

PENGUATAN HARMONISASI SOSIAL MELALUI PENDAMPINGAN PENGEMBANGAN KURIKULUM PAI RESPONSIF TERHADAP KEBERAGAMAN

Uswatun Khasanah¹, Purwoko², Uswatun Chasanah³

Correspondensi e-mail: uswatunkhasanah6815@gmail.com

^{1,2,3}Program Studi Magister Pendidikan Agama Islam, Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman
Kab. Semarang

ABSTRACT

This Community Partnership Program (PKM) aims to strengthen social harmony through participatory and collaborative mentoring in developing an Islamic Education (PAI) curriculum that is responsive to diversity. The program was initiated based on the limited integration of religious moderation, tolerance (tasamuh), and appreciation of pluralism within the existing PAI curriculum structure in educational institutions. The method employed a participatory and collaborative mentoring approach implemented through five stages: needs assessment, conceptual reinforcement workshop, curriculum development mentoring, limited implementation trial, and evaluation and reflection.

The results demonstrate significant reconstruction of the PAI curriculum, particularly in the reformulation of learning outcomes, enrichment of contextual and inclusive materials, application of dialogical and participatory learning strategies, and development of value-based attitude assessment instruments. In addition to producing a more inclusive and context-sensitive curriculum document, the program enhanced teachers' professional capacity to develop and refine curricula in a reflective and sustainable manner. The implementation of the revised curriculum showed increased student engagement and the creation of a more dialogical and harmonious classroom atmosphere. Therefore, mentoring in developing a diversity-responsive PAI curriculum can serve as an effective strategy for strengthening social harmony in educational settings and reinforcing the transformative role of religious education in fostering inclusive and civic-minded character development.

ARTICLE INFO

Submitted: 20 September 2025

Revised: 30 September 2025

Accepted: 8 October 2025

Keywords:

Social harmony; Islamic education curriculum; Religious moderation; Diversity; Collaborative mentoring.

ABSTRAK

Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini bertujuan untuk memperkuat harmonisasi sosial melalui pendampingan pengembangan kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) yang responsif terhadap keberagaman. Latar belakang kegiatan ini didasarkan pada masih terbatasnya integrasi nilai moderasi beragama, tasamuh, dan penghargaan terhadap pluralitas dalam struktur kurikulum PAI di satuan pendidikan. Metode yang digunakan adalah pendekatan pendampingan partisipatif berbasis kolaboratif (participatory and collaborative mentoring approach) yang dilaksanakan melalui lima tahapan, yaitu analisis kebutuhan, workshop penguatan konseptual, pendampingan pengembangan kurikulum, uji coba terbatas, serta evaluasi dan refleksi.

Hasil kegiatan menunjukkan adanya rekonstruksi signifikan pada dokumen kurikulum PAI, khususnya dalam perumusan capaian pembelajaran, pengayaan materi kontekstual, penerapan strategi pembelajaran dialogis, serta pengembangan asesmen sikap berbasis nilai keberagaman. Selain menghasilkan dokumen kurikulum yang lebih inklusif dan kontekstual, program ini juga meningkatkan kapasitas profesional guru dalam mengembangkan kurikulum secara reflektif dan berkelanjutan. Implementasi

DOI: 10.55080/jim.v4i2.1879

Kata kunci:

Harmonisasi sosial; Kurikulum PAI; Moderasi beragama; Keberagaman; Pendampingan kolaboratif.

JURNAL INDONESIA MENGABDI

<http://tahtamedia.co.id/index.php/jim>

kurikulum yang direvisi memperlihatkan peningkatan partisipasi siswa dan terciptanya suasana pembelajaran yang lebih dialogis dan harmonis. Dengan demikian, pendampingan pengembangan kurikulum PAI yang responsif terhadap keberagaman dapat menjadi strategi efektif dalam membangun harmonisasi sosial di lingkungan pendidikan serta memperkuat peran pendidikan agama sebagai instrumen pembentukan karakter inklusif dan berkeadaban.

PENDAHULUAN

Keberagaman sosial, budaya, etnis, dan agama merupakan karakter fundamental masyarakat Indonesia yang menjadi kekuatan sekaligus tantangan dalam menjaga kohesi sosial. Dalam konteks globalisasi dan transformasi digital, interaksi sosial berlangsung semakin intens dan kompleks, sehingga potensi gesekan sosial berbasis identitas juga meningkat. Laporan berbagai kajian menunjukkan bahwa polarisasi sosial dan narasi intoleransi cenderung berkembang melalui ruang digital apabila tidak diimbangi dengan pendidikan yang menanamkan nilai toleransi dan moderasi (UNESCO, 2021). Oleh karena itu, pendidikan memiliki peran strategis dalam membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya hidup berdampingan secara damai dalam keberagaman.

Pendidikan Agama Islam (PAI) sebagai salah satu mata pelajaran inti memiliki posisi sentral dalam membentuk cara pandang dan sikap keberagamaan peserta didik. PAI tidak hanya berfungsi mentransmisikan pengetahuan keagamaan, tetapi juga menanamkan nilai-nilai etika sosial, keadilan, musyawarah, dan tasamuh (toleransi). Dalam perspektif pendidikan kontemporer, pembelajaran agama harus mampu membentuk karakter inklusif dan menghargai pluralitas sebagai bagian dari ajaran Islam yang rahmatan lil 'alamin. Namun, sejumlah studi menunjukkan bahwa implementasi kurikulum PAI di beberapa satuan pendidikan masih cenderung normatif dan belum sepenuhnya responsif terhadap konteks keberagaman sosial (Azra, 2021; Hidayat & Prasetyo, 2022). Kondisi ini mengindikasikan perlunya penguatan kurikulum agar lebih kontekstual dan adaptif terhadap dinamika masyarakat multikultural.

Transformasi pendidikan melalui implementasi Kurikulum Merdeka memberikan ruang bagi satuan pendidikan untuk mengembangkan kurikulum operasional yang lebih fleksibel dan kontekstual. Kurikulum Merdeka menekankan penguatan profil pelajar Pancasila yang mencakup sikap beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, termasuk kemampuan menghargai keberagaman global (Kemendikbudristek, 2022). Dalam konteks ini, pengembangan kurikulum PAI yang responsif terhadap keberagaman menjadi sangat relevan karena sejalan dengan tujuan pembentukan karakter yang moderat dan inklusif. Namun demikian, pada tataran implementasi, guru dan pengembang kurikulum sering menghadapi keterbatasan dalam mengintegrasikan nilai keberagaman secara sistematis ke dalam capaian pembelajaran, materi, strategi, dan asesmen.

Literatur mutakhir menunjukkan bahwa pendidikan berbasis multikultural dan moderasi beragama efektif dalam menurunkan sikap intoleransi dan meningkatkan kohesi sosial apabila diintegrasikan secara struktural dalam kurikulum (Banks, 2020; Yusuf & Sterkens, 2021). Pendekatan ini tidak hanya menekankan pengakuan terhadap perbedaan, tetapi juga membangun dialog, empati, dan kesadaran kritis terhadap realitas sosial. Dalam konteks pendidikan Islam, penguatan moderasi beragama menjadi agenda strategis nasional untuk mencegah radikalisme dan memperkuat harmoni sosial (Kementerian Agama RI, 2020). Dengan demikian, kurikulum PAI perlu dirancang secara responsif agar mampu menjawab tantangan keberagaman secara konstruktif.

Di sisi lain, perkembangan teknologi digital turut memengaruhi pola interaksi sosial peserta didik. Paparan informasi yang tidak terfilter berpotensi membentuk persepsi eksklusif atau bahkan intoleran apabila tidak diimbangi dengan literasi kritis dan nilai-nilai inklusivitas (OECD, 2021). Oleh karena itu, penguatan harmonisasi sosial melalui kurikulum PAI tidak hanya relevan secara normatif, tetapi juga mendesak secara sosiologis. Pendidikan agama perlu hadir sebagai ruang dialog dan pembentukan kesadaran kolektif tentang pentingnya hidup berdampingan dalam masyarakat majemuk.

Meskipun urgensi pengembangan kurikulum PAI responsif terhadap keberagaman telah banyak dibahas secara konseptual, praktik di lapangan menunjukkan bahwa guru dan pengelola pendidikan masih membutuhkan

pendampingan dalam proses rekonstruksi kurikulum. Proses pengembangan kurikulum memerlukan analisis kebutuhan, perumusan tujuan yang kontekstual, pemilihan materi yang inklusif, serta strategi pembelajaran yang dialogis dan partisipatif. Tanpa pendampingan yang sistematis, penguatan nilai harmonisasi sosial berpotensi hanya menjadi wacana normatif tanpa implementasi konkret.

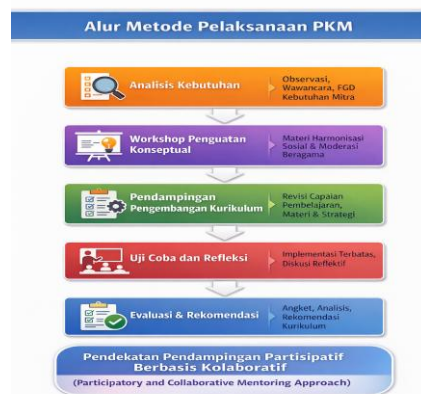
Pendampingan dalam pengembangan kurikulum merupakan pendekatan strategis yang menempatkan mitra sebagai subjek aktif dalam proses perubahan. Model pendampingan partisipatif memungkinkan terjadinya refleksi bersama, identifikasi kebutuhan kontekstual, serta kolaborasi dalam merancang perangkat kurikulum yang relevan (Yuliana & Firmansyah, 2023). Pendekatan ini sejalan dengan paradigma pengembangan profesional berkelanjutan yang menekankan kolaborasi, refleksi, dan praktik langsung sebagai kunci peningkatan kualitas pendidikan (Trust, 2020).

Berdasarkan latar belakang tersebut, Program Kemitraan Masyarakat (PKM) ini dirancang untuk memperkuat harmonisasi sosial melalui pendampingan pengembangan kurikulum PAI yang responsif terhadap keberagaman. Program ini bertujuan membantu mitra dalam merekonstruksi kurikulum PAI agar lebih inklusif, kontekstual, dan berorientasi pada penguatan nilai tasamuh, moderasi beragama, serta penghargaan terhadap pluralitas. Melalui pendekatan partisipatif dan kolaboratif, diharapkan kurikulum yang dihasilkan tidak hanya memenuhi standar administratif, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam membangun budaya sekolah yang harmonis dan berkeadaban.

Dengan demikian, penguatan harmonisasi sosial melalui kurikulum PAI bukan sekadar agenda normatif, melainkan langkah konkret dalam membentuk generasi yang mampu hidup berdampingan secara damai dalam keberagaman. PKM ini diharapkan memberikan kontribusi nyata terhadap transformasi pendidikan agama yang lebih responsif terhadap dinamika sosial kontemporer dan mendukung terwujudnya kohesi sosial yang berkelanjutan.

METODE

Program Kemitraan Masyarakat (PKM) ini menggunakan pendekatan pendampingan partisipatif berbasis kolaboratif (participatory and collaborative mentoring approach) dalam pengembangan kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) yang responsif terhadap keberagaman. Pendekatan ini menempatkan mitra sebagai subjek aktif dalam proses analisis, perancangan, revisi, dan implementasi kurikulum. Metode ini dipilih karena pengembangan kurikulum yang efektif memerlukan keterlibatan langsung pemangku kepentingan agar hasilnya kontekstual dan berkelanjutan (Yuliana & Firmansyah, 2023). Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 7 Maret 2025.



Gambar 1. Alur metode pelaksanaan PKM

Pelaksanaan PKM dilakukan melalui lima tahapan utama, yaitu: (1) analisis kebutuhan, (2) workshop penguatan konseptual, (3) pendampingan pengembangan kurikulum, (4) uji coba terbatas dan refleksi, serta (5) evaluasi dan penyusunan rekomendasi.

1. Tahap Analisis Kebutuhan (Needs Assessment)

Tahap awal dilakukan melalui observasi, wawancara, dan diskusi kelompok terarah (FGD) dengan guru PAI dan pengelola kurikulum di sekolah mitra. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi:

- a. Kesesuaian kurikulum PAI yang digunakan dengan konteks keberagaman peserta didik
- b. Integrasi nilai moderasi beragama dan tasamuh dalam capaian pembelajaran
- c. Kebutuhan penguatan kompetensi guru dalam pengembangan kurikulum

Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif-kualitatif untuk merumuskan kebutuhan prioritas pengembangan. Tahap ini penting agar intervensi bersifat kontekstual dan berbasis masalah nyata (UNESCO, 2021).

2. Tahap Workshop Penguatan Konseptual

Tahap kedua berupa workshop yang bertujuan memperkuat pemahaman mitra mengenai: 1) Konsep harmonisasi sosial dalam perspektif pendidikan; 2) Moderasi beragama dan pendidikan multikultural 3) Prinsip pengembangan kurikulum responsif terhadap keberagaman 4) Integrasi nilai tasamuh dalam pembelajaran PAI. Metode yang digunakan dalam workshop adalah ceramah interaktif, studi kasus, dan diskusi kelompok. Pendekatan partisipatif ini bertujuan membangun kesadaran kritis dan komitmen bersama dalam merekonstruksi kurikulum.

3. Tahap Pendampingan Pengembangan Kurikulum

Tahap inti PKM adalah pendampingan intensif dalam penyusunan dan revisi kurikulum PAI. Pendampingan dilakukan melalui:

- a. Penyusunan ulang capaian pembelajaran berbasis nilai keberagaman
- b. Pengembangan materi ajar yang inklusif dan kontekstual
- c. Perancangan strategi pembelajaran dialogis dan partisipatif
- d. Penyusunan instrumen asesmen yang mendukung pembentukan sikap toleran

Pendampingan dilakukan secara kolaboratif melalui kerja kelompok dan konsultasi berkala. Model ini mengacu pada prinsip **practice-based mentoring**, di mana mitra belajar melalui praktik langsung dan umpan balik berkelanjutan (Trust, 2020).

4. Tahap Uji Coba Terbatas dan Refleksi

Kurikulum yang telah direvisi kemudian diuji coba secara terbatas dalam proses pembelajaran PAI di kelas. Selama uji coba, dilakukan observasi untuk melihat:

- a. Keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran
- b. Respons terhadap materi yang mengangkat nilai keberagaman
- c. Efektivitas strategi pembelajaran dialogis

Setelah uji coba, dilakukan refleksi bersama melalui diskusi evaluatif. Refleksi ini bertujuan mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan kurikulum yang telah dikembangkan serta merumuskan perbaikan.

5. Tahap Evaluasi dan Penyusunan Rekomendasi

Tahap akhir adalah evaluasi menyeluruh terhadap proses dan hasil kegiatan PKM. Evaluasi dilakukan melalui:

- a. Angket respons mitra
- b. Analisis dokumen kurikulum yang telah direvisi
- c. Diskusi reflektif akhir

Hasil evaluasi digunakan untuk menyusun rekomendasi penguatan kurikulum PAI yang berkelanjutan. Selain itu, disusun pula dokumen kurikulum final sebagai luaran utama PKM.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL PENGABDIAN

Pelaksanaan Program Kemitraan Masyarakat (PKM) melalui pendekatan pendampingan partisipatif berbasis kolaboratif (*participatory and collaborative mentoring approach*) menunjukkan dinamika perubahan yang bertahap namun signifikan dalam pengembangan kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) yang responsif terhadap keberagaman. Proses yang dilakukan tidak hanya menghasilkan dokumen kurikulum yang direvisi, tetapi juga membentuk transformasi paradigma keberagaman, penguatan kompetensi pedagogik, serta pembentukan budaya reflektif dalam komunitas mitra. Hasil kegiatan berikut dianalisis berdasarkan tahapan metode secara sistematis dan mendalam.



Gambar 2. Tahap Persiapan Kegiatan

1. Tahap Analisis Kebutuhan: Pemetaan Realitas dan Identifikasi Kesenjangan

Tahap analisis kebutuhan menjadi fondasi utama dalam keseluruhan proses PKM. Melalui observasi, wawancara, dan diskusi kelompok terarah (FGD), diperoleh gambaran komprehensif mengenai kondisi kurikulum PAI yang digunakan oleh mitra. Secara administratif, dokumen kurikulum telah memuat visi pembentukan karakter religius dan berakhlak mulia. Namun, dalam praktiknya, nilai harmonisasi sosial dan keberagaman belum terintegrasi secara eksplisit dalam rumusan capaian pembelajaran maupun indikator evaluasi.

Ditemukan bahwa pembelajaran PAI masih dominan pada pendekatan tekstual dan normatif. Materi lebih berfokus pada penguasaan konsep fikih, akidah, dan sejarah Islam tanpa eksplorasi kontekstual

JURNAL INDONESIA MENGABDI

<http://tahtamedia.co.id/index.php/jim>

terhadap realitas sosial peserta didik yang majemuk. Hal ini menyebabkan siswa memahami nilai toleransi secara teoritis, tetapi belum memiliki pengalaman reflektif dan dialogis dalam mengelola perbedaan.

Kesenjangan ini juga tampak dalam strategi pembelajaran yang cenderung satu arah. Guru masih memposisikan diri sebagai sumber utama pengetahuan, sementara siswa berperan sebagai penerima informasi. Model ini kurang memberikan ruang pada diskusi kritis dan eksplorasi perspektif yang beragam.

Selain itu, analisis kebutuhan menunjukkan bahwa guru memiliki kesadaran akan pentingnya moderasi beragama, tetapi belum memiliki perangkat teknis untuk mengintegrasikannya ke dalam struktur kurikulum. Kebutuhan akan pendampingan yang sistematis dan aplikatif menjadi semakin jelas pada tahap ini.

2. **Workshop Penguatan Konseptual: Transformasi Pemahaman dan Orientasi**

Workshop penguatan konseptual menjadi momentum penting dalam merekonstruksi pemahaman mitra mengenai hubungan antara pendidikan agama dan harmonisasi sosial. Diskusi mendalam mengenai konsep moderasi beragama, pendidikan multikultural, dan kohesi sosial memperluas wawasan guru tentang urgensi kurikulum yang inklusif.

Pada tahap ini terjadi pergeseran orientasi pembelajaran. Guru mulai memandang PAI bukan hanya sebagai sarana transmisi ajaran normatif, tetapi juga sebagai wahana pembentukan karakter sosial yang mampu hidup berdampingan dalam keberagaman. Dialog interaktif yang terjadi selama workshop membuka ruang refleksi terhadap praktik pembelajaran yang selama ini dilakukan.

Workshop juga menghasilkan kesepakatan bahwa harmonisasi sosial harus menjadi nilai inti (core value) dalam kurikulum PAI. Nilai tasamuh, keadilan sosial, musyawarah, dan penghargaan terhadap pluralitas diposisikan sebagai elemen yang harus terintegrasi secara struktural, bukan sekadar tambahan materi.

Pendekatan partisipatif dalam workshop memungkinkan mitra menyampaikan pengalaman dan tantangan yang mereka hadapi. Hal ini memperkuat rasa kepemilikan terhadap perubahan yang akan dilakukan dan mendorong komitmen kolektif dalam proses rekonstruksi kurikulum.

3. **Pendampingan Pengembangan Kurikulum: Rekonstruksi Komponen Kurikulum**

Tahap pendampingan menjadi inti dari keseluruhan kegiatan. Pada tahap ini dilakukan rekonstruksi menyeluruh terhadap komponen kurikulum PAI. Perubahan pertama terlihat pada perumusan capaian pembelajaran yang kini memuat dimensi sikap toleran, empati sosial, dan kemampuan berdialog lintas perbedaan.

Materi ajar juga mengalami pengayaan dengan memasukkan tema-tema kontekstual seperti praktik toleransi dalam sejarah Islam, nilai kebangsaan dalam perspektif Islam, serta studi kasus konflik sosial yang dapat dijadikan bahan refleksi. Integrasi konteks lokal menjadi strategi penting agar siswa merasa dekat dengan materi yang dipelajari.

Strategi pembelajaran direorientasikan menjadi lebih dialogis dan partisipatif. Guru mulai mengimplementasikan metode diskusi kelompok, studi kasus, simulasi peran (role play), serta proyek sosial berbasis kolaborasi. Model ini mendorong siswa untuk aktif mengemukakan pendapat dan belajar menghargai perspektif yang berbeda.

Aspek asesmen juga direvisi dengan menambahkan penilaian sikap melalui observasi, jurnal refleksi, dan portofolio. Pendekatan ini memperluas dimensi evaluasi dari sekadar kognitif menuju afektif dan sosial. Pendampingan kolaboratif memungkinkan guru memperoleh umpan balik secara langsung terhadap setiap revisi. Proses ini tidak hanya meningkatkan kualitas dokumen kurikulum, tetapi juga membangun kapasitas profesional dalam pengembangan kurikulum berbasis kebutuhan.

4. Uji Coba Terbatas: Implementasi dan Respons Peserta Didik

Implementasi kurikulum hasil revisi menunjukkan perubahan positif dalam dinamika kelas. Siswa terlihat lebih aktif dalam diskusi dan lebih terbuka dalam menyampaikan pandangan. Pembelajaran yang dialogis menciptakan suasana kelas yang inklusif dan kondusif. Uji coba juga menunjukkan bahwa pendekatan kontekstual membantu siswa memahami keberagaman sebagai realitas sosial yang harus dikelola secara bijak. Diskusi tentang kasus nyata mendorong siswa berpikir kritis dan empatik. Guru melaporkan peningkatan rasa percaya diri dalam memfasilitasi diskusi yang sensitif. Pendekatan partisipatif membantu mereka mengelola perbedaan pendapat secara konstruktif.

Meskipun demikian, terdapat tantangan seperti keterbatasan waktu dan perlunya pelatihan lanjutan dalam teknik fasilitasi dialog. Refleksi bersama menjadi ruang evaluasi untuk menyempurnakan strategi pembelajaran.

5. Evaluasi Akhir dan Implikasi Penguatan Harmonisasi Sosial

Evaluasi menyeluruh menunjukkan bahwa PKM ini berhasil menghasilkan kurikulum PAI yang lebih responsif terhadap keberagaman. Lebih dari itu, terjadi perubahan paradigma di kalangan guru mengenai peran pendidikan agama dalam membangun kohesi sosial. Dampak jangka panjang dari program ini berpotensi menciptakan budaya sekolah yang inklusif dan dialogis. Kurikulum yang direvisi dapat menjadi model penguatan moderasi beragama berbasis institusi pendidikan.

Pendekatan pendampingan partisipatif berbasis kolaboratif terbukti efektif dalam menciptakan perubahan yang berkelanjutan karena melibatkan mitra secara aktif dalam seluruh proses. Transformasi yang terjadi bukan hanya pada dokumen, tetapi juga pada pola pikir dan praktik pedagogis.

PEMBAHASAN

Secara komprehensif, pelaksanaan PKM ini menunjukkan bahwa penguatan harmonisasi sosial melalui pengembangan kurikulum PAI yang responsif terhadap keberagaman bukanlah proses yang instan, melainkan memerlukan transformasi paradigma, restrukturisasi kurikulum, dan perubahan praktik pedagogis secara bertahap. Perubahan yang terjadi tidak hanya bersifat administratif dalam bentuk revisi dokumen, tetapi menyentuh dimensi epistemologis tentang bagaimana pendidikan agama dipahami dan diimplementasikan dalam konteks masyarakat majemuk.

Transformasi tersebut dimulai dari kesadaran bahwa pendidikan agama tidak dapat berdiri dalam ruang hampa sosial. Kurikulum PAI harus mampu menjawab tantangan pluralitas, dinamika sosial, serta potensi konflik identitas yang berkembang di masyarakat. Dengan demikian, harmonisasi sosial tidak sekadar menjadi nilai tambahan, tetapi menjadi orientasi utama dalam perancangan pembelajaran. Hal ini menunjukkan bahwa kurikulum berfungsi sebagai instrumen rekayasa sosial (*social engineering tool*) yang dapat membentuk pola pikir dan perilaku generasi muda.

Pendekatan pendampingan partisipatif berbasis kolaboratif terbukti menjadi faktor kunci dalam menciptakan perubahan yang berkelanjutan. Keterlibatan aktif mitra dalam setiap tahapan memungkinkan terjadinya proses refleksi kritis dan dialog konstruktif. Transformasi yang muncul bukan hasil intervensi satu arah, melainkan hasil negosiasi makna dan kesepahaman bersama antara tim pelaksana dan mitra. Proses ini memperkuat rasa kepemilikan terhadap kurikulum yang dikembangkan sehingga peluang implementasi jangka panjang menjadi lebih besar.

Dari perspektif pedagogis, kurikulum yang responsif terhadap keberagaman mendorong pergeseran dari pembelajaran berbasis transmisi menuju pembelajaran berbasis transformasi. Guru tidak lagi hanya menyampaikan materi, tetapi memfasilitasi proses dialog dan refleksi. Siswa didorong untuk berpikir kritis, memahami perbedaan, serta mengembangkan empati sosial. Pergeseran ini penting dalam membentuk karakter inklusif dan toleran yang menjadi fondasi harmonisasi sosial.

Integrasi nilai tasamuh dan moderasi beragama dalam capaian pembelajaran menunjukkan bahwa dimensi afektif dan sosial memperoleh perhatian yang lebih besar dibandingkan sebelumnya. Kurikulum tidak lagi didominasi aspek kognitif semata, tetapi memperhatikan keseimbangan antara pengetahuan, sikap, dan keterampilan sosial. Keseimbangan ini penting karena pembentukan sikap toleran tidak cukup melalui pemahaman konseptual, melainkan melalui pengalaman dialogis dan reflektif yang berulang.



Gambar 3. Pelaksanaan kegiatan

Dari sisi sosiologis, PKM ini memperlihatkan bahwa sekolah dapat menjadi laboratorium sosial untuk membangun budaya damai. Kurikulum yang inklusif menciptakan ruang interaksi yang menghargai perbedaan. Ketika nilai harmonisasi sosial diinternalisasikan secara sistematis, siswa tidak hanya belajar tentang toleransi, tetapi mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dampak jangka panjangnya adalah terbentuknya generasi yang lebih resilien terhadap narasi intoleransi.

Pendekatan kolaboratif juga memperkuat komunitas profesional guru. Diskusi dan refleksi bersama membangun budaya belajar kolektif (*collective learning culture*). Guru tidak lagi bekerja secara individual, tetapi saling berbagi praktik baik dan pengalaman dalam mengelola pembelajaran berbasis keberagaman. Budaya kolaboratif ini menjadi modal sosial yang penting dalam menjaga keberlanjutan perubahan.

Lebih jauh, keberhasilan PKM ini menunjukkan bahwa rekonstruksi kurikulum harus dilakukan secara kontekstual. Nilai keberagaman perlu dihubungkan dengan realitas lokal peserta didik agar lebih bermakna. Kontekstualisasi ini membantu siswa memahami bahwa perbedaan bukan ancaman, melainkan keniscayaan yang harus dikelola secara bijak.

Dari perspektif kebijakan pendidikan, model pendampingan yang diterapkan dalam PKM ini dapat direkomendasikan sebagai strategi penguatan moderasi beragama berbasis institusi. Pendekatan ini dapat direplikasi pada sekolah lain dengan menyesuaikan konteks masing-masing. Dengan demikian, dampaknya tidak terbatas pada satu mitra, tetapi berpotensi memberikan kontribusi lebih luas dalam penguatan kohesi sosial nasional.

Selain itu, PKM ini menunjukkan bahwa harmonisasi sosial memerlukan integrasi lintas komponen kurikulum, mulai dari perumusan tujuan, pemilihan materi, strategi pembelajaran, hingga asesmen. Pendekatan parsial tidak cukup untuk menciptakan perubahan signifikan. Integrasi yang komprehensif memastikan bahwa nilai keberagaman menjadi bagian dari keseluruhan sistem pembelajaran. Secara reflektif, transformasi kurikulum yang terjadi dalam PKM ini memperlihatkan bahwa perubahan paradigma pendidikan agama harus dimulai dari kesadaran internal para pendidik. Tanpa komitmen dan kesiapan guru, dokumen kurikulum yang baik sekalipun tidak akan berdampak optimal. Oleh karena itu, proses pendampingan yang dialogis dan kolaboratif menjadi fondasi penting dalam membangun komitmen tersebut.

Akhirnya, sintesis mendalam dari keseluruhan proses PKM ini menegaskan bahwa penguatan harmonisasi sosial melalui kurikulum PAI yang responsif terhadap keberagaman merupakan langkah strategis dalam membangun masyarakat yang inklusif dan berkeadilan. Pendidikan agama yang dikelola secara kontekstual, reflektif, dan kolaboratif dapat menjadi kekuatan transformatif dalam mencegah intoleransi dan memperkuat kohesi sosial. Model pendampingan partisipatif berbasis kolaboratif yang diterapkan dalam program ini terbukti efektif dan berpotensi menjadi model pengembangan kurikulum PAI yang adaptif terhadap dinamika sosial kontemporer.

KESIMPULAN

Pelaksanaan Program Kemitraan Masyarakat (PKM) melalui pendekatan pendampingan partisipatif berbasis kolaboratif terbukti efektif dalam memperkuat harmonisasi sosial melalui pengembangan kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) yang responsif terhadap keberagaman. Proses yang sistematis, mulai dari analisis kebutuhan hingga evaluasi reflektif, menghasilkan rekonstruksi kurikulum yang lebih inklusif, kontekstual, dan dialogis. Integrasi nilai tasamuh, moderasi beragama, empati sosial, serta penghargaan terhadap pluralitas ke dalam capaian pembelajaran, materi, strategi, dan asesmen menunjukkan bahwa pendidikan agama dapat menjadi instrumen strategis dalam membangun karakter sosial yang toleran dan berkeadaban.

Selain menghasilkan dokumen kurikulum yang lebih adaptif terhadap realitas masyarakat majemuk, kegiatan ini juga memperkuat kapasitas profesional guru dalam melakukan pengembangan kurikulum secara kolaboratif dan berkelanjutan. Transformasi yang terjadi tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menyentuh perubahan paradigma pedagogis menuju pembelajaran yang partisipatif dan reflektif. Dengan demikian, model pendampingan yang diterapkan dalam PKM ini dapat direkomendasikan sebagai strategi efektif dalam penguatan harmonisasi sosial berbasis kurikulum PAI di berbagai satuan pendidikan.

REFERENSI

- Azra, A. (2021). Pendidikan Islam dan penguatan moderasi beragama di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Islam*, 7(2), 123–138.
- Najma, D. B. A. (2021). Pendidikan moderasi beragama dalam penguatan identitas kebangsaan. *Edukasi Islami*, 6(1), 45–62.
- Yusuf, M., & Sterkens, C. (2021). Religious education and social cohesion in plural societies. *British Journal of Religious Education*, 43(4), 412–425.
- Suryani, N., & Lestari, P. (2021). Pengembangan e-book untuk mendukung pembelajaran PAI di perguruan tinggi. *International Journal of Instructional Media*, 12(1), 40–52.
- Ramadhan, S. (2021). Transformasi pembelajaran berbasis digital dalam pendidikan tinggi. *Jurnal Pendidikan Modern*, 7(3), 120–135.
- Putri, M., & Rachman, F. (2021). Pengembangan media pembelajaran interaktif untuk peningkatan keterlibatan siswa. *Journal of Instructional Technology*, 11(2), 150–164.
- Zulkarnain, I., & Rahman, F. (2021). Media pembelajaran interaktif berbasis multimedia dalam meningkatkan keterampilan abad 21. *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 23(1), 12–27.
- Trust, T. (2021). From emergency remote teaching to sustainable digital pedagogy: lessons for teacher professional learning. *Journal of Technology and Teacher Education*, 29(1), 1–17.
- Pangrazio, L., Godhe, A., & Ledesma, A. G. L. (2021). Digital literacy and curriculum implications: comparative perspectives. *Media and Communication*, 9(3), 88–103.
- Kemendikbudristek. (2022). *Panduan implementasi Kurikulum Merdeka*. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia.
- Hasanah, L., & Purwanto, A. (2022). Implementasi buku ajar digital dalam pembelajaran terpadu di sekolah. *Jurnal Kurikulum dan Pembelajaran*, 14(1), 67–80.
- Sugiyarti, L., & Wibowo, H. (2022). Penguatan kompetensi pedagogik mahasiswa calon guru melalui pelatihan berbasis praktik. *Jurnal Kependidikan*, 16(1), 55–70.
- Wahyuni, S., & Kurniawan, D. (2022). Digital literacy competence among university students in the era of Society 5.0. *Journal of Digital Education Research*, 4(2), 89–102.

- Yuliana, R., & Firmansyah, H. (2023). Practice-based training model for curriculum development. *Journal of Teacher Education and Professional Development*, 18(2), 134–149.
- Rahmawati, D., & Suryadi, A. (2023). Project-based learning in digital material development for preservice teachers. *Journal of Educational Practice*, 14(4), 200–213.
- Malini, P., & Santoso, R. (2023). Digital media integration and student engagement in higher education. *Journal of Learning Innovation*, 9(1), 33–47.
- Santoso, R., & Hidayat, A. (2023). Pengembangan media pembelajaran digital dan peningkatan literasi mahasiswa. *Jurnal Inovasi Pendidikan*, 10(2), 75–88.
- Ngabiyanto, N. (2024). Collaborative mentorship for transformative teachers: model and practice. *Journal of Curriculum & Education*, 12(1), 25–42.
- Yetti, E. (2024). Pedagogical innovation and curriculum adaptation in the digital era. *Journal of Contemporary Education Studies*, 15(1), 25–39.
- Moriau, L. (2024). Participatory curriculum development: lessons from connected learning communities. *Curriculum Journal*, 35(2), 157–176.
- Makrakis, V. (2023). A participatory curriculum approach to ICT-enabled curriculum transformation. *Sustainability*, 15(5), 3967.
- Banks, J. A. (2022). Multicultural education in practice: policy and classroom implications. *Educational Researcher*, 51(2), 120–135.
- OECD. (2021). *21st century readers: Developing literacy skills in a digital world*. OECD Publishing.
- UNESCO. (2021). *Reimagining our futures together: A new social contract for education*. UNESCO Publishing.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2021). *Strategi nasional moderasi beragama: pedoman dan implementasi*. Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.